

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT OLEH LEMBAGA KERAPATAN
ADATNAGARI BAYUR KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN
AGAM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN**

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :



PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing :

**Nelwitis,S.H., M.H
Iwan Kurniawan,S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

PENERAPAN SANSKI PIDANA ADAT OLEH LEMBAGA KERAPATAN ADATNAGARI BAYUR KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

ABSTRAK

Hukum adat merupakan cerminan dari kehidupan serta nilai yang hidup dalam suatu masyarakat. Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di Nagari Bayur, akibat maraknya tindak pidana pencurian yang terjadi mendorong para pemuka adat dan masyarakat untuk menyelesaikan melalui ketentuan pidana adat. Penerapan sanksi pidana adat diselenggarakan melalui sidang peradilan adat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh lembaga kerapatan adat Nagari Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, hambatan dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan respon aparat penegak hukum terhadap penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan sanksi pidana adat dilakukan melalui sidang nagari dalam suatu peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga kerapatan adat nagari. Sanksi yang diterapkan berupa: permintaan maaf, denda atau ganti kerugian dan diusir dari kampung. Hambatan dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian disebabkan oleh aparat penegak hukum, pelaku, korban dan masyarakat. Aparat penegak hukum terutama kepolisian sektor Tanjung Raya mendukung penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dianggap sebagai upaya menerapkan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana.

Kata kunci : Hukum Pidana Adat, Sanksi Pidana Adat, Tindak Pidana Pencurian

